

# Globalisme dan Multi-Versalisme: Beberapa Catatan tentang Dinamika Sosial Budaya di Bali

I Ketut Ardhana\*

## Abstract

Globalism has variously impacted on the social, cultural, economic, legal and political life of the Balinese, which in turn has changed the structure of Balinese society. Ultimately, this could also create conflicts or other social problems. Indeed, there are many regulations to anticipate and to deal with such issues, but these have not been satisfactory due to weaknesses in implementation. This can be seen in the way issues on globalism affect ideas of multi-versalism, which could in turn foster particular changes towards sustainable development in Balinese society.

The majority of people who reside in the Bali Island are Balinese, who are adherents of Hinduism. The Balinese have attempted to solve the problems caused by globalization not only in the context of their daily life, but also in the context of religion. It is important to note here that the religious issues are closely linked with the local issues, especially those dealing with their longstanding cultural. This essay will address several issues: firstly, how globalism affects social, cultural, economic, and political aspects of Balinese life; secondly, how the Balinese anticipate or solve contemporary problems; and finally how the global and national issues have been tackled by the Balinese society through local wisdom. An analysis of these important issues is expected to offer a better understanding of globalism in the context of Balinese local wisdom and the ideas of multi-versalism.

**Keywords:** globalism, multi-versalism, regional autonomy, security, landscape, and border conflicts.

---

\* Vice-President dari IFSSO (*International Federation of Social Science Organizations*) dan *founding members* dari *World Social Sciences and Humanities* (WSSH). Sebelumnya adalah Kepala Bidang Penelitian Asia Tenggara di LIPI, kini Ketua Pusat Kajian Bali (PKB) dan Ketua International Office (IO) Universitas Udayana. Risetnya berkaitan dengan multikulturalisme dan diaspora, serta wacana sejarah dan politik di Asia Tenggara. Menulis disertasi yang terbit di Jerman, *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft von 1915 bis 1950*, dan telah diterjemahkan *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

## Pendahuluan

Berakhirnya era Orde Baru yang dicirikan dengan adanya pemerintahan yang otoritarian yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun di Indonesia memberikan dampak perubahan pada kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik masyarakat baik di pusat, maupun di daerah (Hisyam 2005). Bali sebagai sebuah mosaik Hindu di Asia Tenggara di mana penduduknya mayoritas beragama Hindu memiliki dinamikanya yang khas dalam perjalanan sejarah dari masa Orde Baru hingga memasuki masa Reformasi ini.

Ada kenangan positif yang masih tertinggal dalam kehidupan masyarakat Bali dan ada juga kenangan yang negatif. Kenangan positif yang masih berbekas dalam memori kelompok masyarakat misalnya bagaimana bangsa ini yang pernah dipimpin oleh orang militer memberi kesan akan adanya rasa proteksi pada masalah stabilitas keamanan pada masyarakat. Lihat saja misalnya bagaimana ketika mengakhiri rasa tidak aman di masa lalu pernah dilakukannya apa yang dikenal sebagai “penembakan misterius” yang dianggap dapat menurunkan tingkat kejahatan. Memori negatif misalnya bagaimana selama berkuasanya “rezim militer” di masa Orde Baru itu seolah-olah terkesan tidak adanya ruang untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan hak azasi manusia.

Paradigma seperti inilah yang berkembang di masyarakat pada akhir masa pemerintahan Orde Baru (Klinken 2005). Akan tetapi, dengan berakhirnya rezim Orde Baru (1966–1998) itu tampaknya banyak dipengaruhi oleh rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap karakter yang telah terbentuk yang dicirikan oleh “kolusi, korupsi dan nepotisme” (KKN). Noda hitam seperti inilah seolah-olah berhasil menutupi segala keberhasilan yang pernah diraih di masa Orde Baru. Adanya persoalan-persoalan kemiskinan, ketertinggalan dalam pengembangan kebijakan dalam ilmu

sosial dan kemanusiaan (Ardhana 2010), keterbelakangan yang dikategorikan sebagai desa-desa tertinggal dianggap hasil kebijakan yang salah di masa Orde Baru. Masyarakat pun bergerak seolah-olah bangkit dari ketidakberdayaan di masa Orde Baru, sehingga adanya tuntutan akan kehidupan masyarakat yang demokratis, terkesan seolah-olah kebablasan sebagaimana terjadi di ajang demonstrasi di jalan-jalan yang hampir bisa dilihat setiap saat di jalan-jalan ibu kota, demikian pula dengan timbulnya berbagai konflik yang multidimensional itu yang kadang-kadang tercampur antara persoalan agama, suku, yang apabila dibiarkan muncul ke permukaan berubah menjadi anarkhis.

Dalam konteks ini, apa yang ditampilkan para demonstran di jalan-jalan seolah-olah menunjukkan akan tipisnya nilai-nilai adiluhung yang dahulu pernah ada yang dimiliki mereka yang berdasarkan kehidupan yang aman dan cinta perdamaian di masa lalu, namun karena berbagai terobosan dilakukan ternyata tidak mampu menyalurkan aspirasi mereka, perubahan tindakan mereka menjadi tanpa kendali atau anarkhis.

Dari gambaran ini terlihat bahwa masyarakat seolah-olah tercabik-cabik dari akar budayanya, sehingga harga sebuah kehidupan yang nyaman, aman, dan damai menjadi mahal di negeri ini pada saat-saat sekarang ini. Ini tentu tidak mengisyaratkan bahwa tidak adanya aturan di negeri ini, namun yang menjadi masalah adalah tingkat implementasi yang belum jelas, tumpang tindih dan kadang-kadang tidak konsisten. Inilah beberapa hal yang memunculkan beberapa persoalan dalam masyarakat dewasa ini berkaitan dengan kemana negeri ini akan diarahkan? Mampukan masyarakat kita dewasa ini eksis menghadapi berbagai persoalan itu? Adanya perkembangan kehidupan yang semakin meng-global sudah sangat mengkhawatirkan kehidupan mereka. Sebut saja misalnya bagaimana masyarakat yang memiliki

pasar-pasar tradisional mereka semakin terkepung oleh mall-mall besar. Mereka pun tanpa pernah menyadari bagaimana sebenarnya kehidupan café-café di daerah-daerah pedesaan juga mengubah pola kehidupan masyarakat di pedesaan (Cf. Tirtosudarmo 2005). Masyarakat pun mulai berlomba-lomba menjual tanah mereka untuk dapat membuka usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata, akan tetapi karena kurangnya keterampilan yang dimilikinya, tampaknya mereka pun tidak bisa bersaing dengan usaha-usaha besar di sektor pariwisata ini (*Penguasaan Tanah Adat*, 2008; Ardhana 2011). Masyarakat menjadi khawatir terhadap segala perkembangan yang berasal dari luar dan mulai menanyakan apakah eksistensi tradisi dan budaya mereka yang diturunkan oleh nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu itu akan dapat terus dipertahankan dan berkelanjutan di masa yang akan datang? Inilah beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan persoalan yang sifatnya multidimensi baik menyangkut isu konflik multidimensi, ekonomi kreatif, daya saing, tata ruang, sengketa batas desa, perebutan pendapatan asli daerah (PAD), isu putra daerah, nasionalisme, karakter bangsa, kearifan lokal, dan sebagainya (Ardhana, 2007).

Untuk itu, dalam melihat bagaimana kompleksnya perkembangan di daerah khususnya di Bali, maka dalam pembahasan berikut akan dilihat beberapa topik yang dianggap relevan untuk dikaji lebih mendalam dalam upaya memahami secara lebih baik tentang persoalan-persoalan sosial, budaya, sejarah dan kemasyarakatan di daerah Bali dalam kaitannya dengan upaya mempertebal rasa nasionalisme atau keindonesiaan (Elson 2008), peningkatan nilai-nilai karakter bangsa, upaya membangun semangat atau daya saing yang tinggi, menumbuhkan ekonomi kreatif sehingga upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat dilakukan dengan lebih baik (Ardhana

2009).

### **Otonomi Daerah dan Konflik Batas**

Konsep otonomi daerah yang digulirkan tahun 2001 merupakan salah satu produk masa Reformasi yang telah dimulai tahun 1998. Dengan adanya kebijakan tentang otonomi daerah ini euphoria demokrasi dan transparansi semakin berkembang (Reuter 2011). Tekanan-tekanan terhadap daerah sebagaimana terjadi di masa lalu pada rezim Orde Baru, akhirnya muncul peluang atau angin segar bagi daerah-daerah di masa Reformasi ini untuk dapat berkiprah secara lebih luas. Melalui kebijakan otonomi daerah tampaknya memberikan penyegaran pada perkembangan di daerah dan berbagai strategi kebijakan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya dikembangkan. Namun, seringkali karena daerah-daerah itu berlomba-lomba untuk mengembangkan daerahnya dalam kaitannya dengan pemerolehan pendapatan asli daerah yang lebih banyak, maka berbagai konflik kepentingan di daerah-daerah pun tidak terhindarkan.

Banyak daerah-daerah yang dimekarkan akan tetapi karena persoalan ini berkaitan dengan masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tidak jarang terjadi benturan-benturan di tingkat akar rumput (*grass roots*). Terlebih-lebih dengan dikedepankannya konsep putra daerah, maka konflik tidak terhindari dalam terjadinya perebutan pengaruh mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai putra daerah. Tidak jarang terjadi, karena alasan nama tempat suci misalnya terjadi konflik perbatasan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Padahal mereka menggunakan nama tempat suci itu sudah sejak lama. Namun demikian, karena alasan untuk memasukkan tempat suci itu ke dalam sebuah wilayah yang diinginkan, maka wilayah masyarakat yang tidak diinginkan untuk dimasukkan ke sebuah wilayah

merasa keberatan dan memaksa kelompok lainnya itu tidak menggunakan nama tempat suci atau wilayah itu. Inilah konflik yang berlangsung di salah satu desa di Kabupaten Gianyar.

Selain di Kabupaten Gianyar misalnya, juga terjadi konflik antardesa dan antarbanjar yang kalau dilihat penyebabnya didasari atas bagaimana memperoleh PAD yang lebih besar atau kemungkinan untuk memekarkan wilayah agar memperoleh PAD sendiri. Ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji misalnya bagaimana dampak implementasi kebijakan otonomi daerah yang sangat berpengaruh pada perkembangan di daerah Bali. Karena kebijakan otonomi daerah yang menempatkan kebijakan di tingkat kabupaten, tidak mengherankan peran kabupaten yang dipimpin para bupati menjadi dominan. Inilah sebabnya mengapa dengan kebijakan otonomi daerah ini memunculkan peran bupati sebagai “raja-raja kecil” di daerahnya masing-masing. Tidak jarang bahkan bupati konflik dengan pimpinan daerah lainnya dalam kaitannya dengan persoalan tanah adat misalnya dengan gubernur dalam pelaksanaan kebijakan, karena bupati menganggap posisi mereka lebih berperan dibandingkan dengan gubernur. Berbagai upaya dilakukan dengan melihat kemungkinan penyelesaian beberapa konflik yang muncul, misalnya dengan melihat kembali kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya antar pemuka agama Hindu di Bali yang diprakarsai oleh lembaga tertinggi umat Hindu di Bali yaitu Parisada Hindu Dharma, yaitu dengan apa yang disebut dengan *bhisama*.

Hal ini biasa terjadi dalam masyarakat Timur di mana kalau memiliki persoalan-persoalan sehingga diupayakan mencari solusinya dengan mencari pandangan-pandangan yang diberikan oleh agama atau lembaga agama yang ada. Namun, perlu dicatat, bahwa *bhisama* yang pernah

dikeluarkan itu tampaknya sering bersifat multitafsir, sehingga seringkali diinterpretasikan dengan cara pandang yang berbeda dari kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, persoalan *bhisama* ini perlu diteliti lebih jauh mengenai kapan sebenarnya berlakunya dan dalam konteks bagaimana *bhisama* itu perlu dilaksanakan. Selama ini ada pandangan yang melihat bahwa *bhisama* itu sebagai sesuatu yang sakral dan sulit disentuh oleh kalangan publik. Secara hukum, aturan-aturannya ada, namun di tingkat implementasinya yang mengalami kesulitan-kesulitan sehingga perlu pembahasan secara integral mengenai substansi *bhisama* dan strategi implementasinya yang tepat sasaran.

### **Dari Tokoh Pahlawan hingga Putra Daerah**

Dampak otonomi daerah berpengaruh terhadap upaya-upaya untuk menggali potensi-potensi daerah baik yang menyangkut sumberdaya alam dan sumber daya manusianya. Dari sumber daya alam memang Bali lebih banyak tergantung dengan perkembangan dari luar.<sup>1</sup> Sementara sumber daya manusia diharapkan Bali mampu memiliki figur-figur pimpinan dari daerah sendiri seperti munculnya konsep putra daerah. Untuk itulah, tidak mengherankan peran tokoh menjadi penting yang dikaitkan dengan peran sejarah di masa lalu.

Isu sejarah yang berkembang di Bali adalah dengan dikedepankannya paradigma untuk mengangkat seorang tokoh di masa lalu menjadi pahlawan nasional. Misalnya saja bagaimana keinginan masyarakat untuk mengangkat tokoh Cokorda Ngurah Agung atau Cokorda Mantuk Ring Rana (Cokorda yang gugur dalam peperangan) untuk diajukan

---

<sup>1</sup> Lihat saja misalnya bagaimana pada pelaksanaan upacara-upacara besar di Bali, maka kebutuhan peralatan upacara seperti daun kelapa atau janur, buah-buahan yang berasal dari Jawa Timur.

sebagai pahlawan nasional. Persoalan ini dilematis karena peran raja waktu itu ada yang menganggap mengadakan *puputan* dengan membunuh diri sebagai sebuah ide yang kurang pertimbangan matang. Sementara di lain pihak, adanya anggapan bahwa raja melakukan *puputan* (perang habis-habisan, tanpa menyerah kalah) karena mempercayai bahwa ia dan rakyatnya tidak mau dijajah, oleh karena itu melakukan bunuh diri dalam *puputan* yang dipercaya bisa memperoleh surga daripada terhina dijajah Belanda. Kekonsistenan sikap raja ini dianggap juga sebagai salah satu karakter yang bisa diangkat menjadi karakter bangsa yang rela berkorban demi nusa dan bangsa dan patut diteladani dalam upaya meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa di masa kini dan masa depan.

Dapat dikatakan bahwa di satu pihak, pengajuan tokoh daerah untuk menjadi pahlawan nasional—dilakukan dalam upaya meningkatkan rasa nilai-nilai heroisme di kalangan masyarakat di daerah yang terbentuk terutama setelah mendapat pengaruh secara tidak langsung ketika penjajahan Jepang yang menebarkan semangat anti Belanda-memang penting (Ardhana 2011b). Namun di pihak yang lainnya, muncul paradigma yang mengedepankan bahwa seolah-olah dengan semakin banyaknya tokoh-tokoh dari pewaris kerajaan-kerajaan yang ada itu diajukan sebagai pahlawan nasional maka muncul kesan untuk memperoleh modal atau asset yang dianggap berjasa di masa lalu, untuk diturunkan legitimasi itu kepada keturunannya, sehingga semakin banyak posisi bupati atau wali kota yang kemudian diisi oleh paradigm ini. Perlu dicatat bahwa di masa lalu tampaknya tidak semudah sekarang bagi kalangan aristokrat mencapai posisi ini. Alasannya adalah bahwa di masa lalu sering terjadi konflik antarcalon yang karena konflik itu dianggap mengganggu stabilitas nasional (di mana konsep ini menjadi jargon yang digunakan di masa Orde Baru),



maka daripada konflik secara terus-menerus, maka biasanya diangkat kepala daerah bukan orang Bali, tetapi orang luar Bali. Misalnya ketika itu Soekarmen seorang militer yang berasal dari etnis Jawa diangkat menjadi Gubernur Bali sehingga pertikaian antarcalon yang berasal dari etnis Bali yang bertikai itu dapat dihindari. Solusi yang ditempuh ini dianggap tepat pada waktu itu dalam menyelesaikan persoalan konflik di Bali.

Namun, sekarang di era Otonomi Daerah ini, tampaknya masyarakat mendapat peluang kembali untuk memenuhi kerinduan akan munculnya pimpinan-pimpinan mereka itu dari kalangan yang dahulunya dianggap berjasa di masa lalu, yang masih dikenang sampai sekarang. Oleh karena itu, tidak mengherankan sekarang ini banyak jabatan Bupati untuk menyebutkan beberapa contoh seperti Bupati Badung (yang dijabat oleh keturunan Raja Mengwi, sebagai raja tersohor di Bali abad ke-18 sebelum munculnya Kerajaan Badung).<sup>2</sup> Posisi Wakil Gubernur Bali (2008-2013), misalnya dijabat oleh Anak Agung Ngurah Puspayoga, keturunan Raja Denpasar, Wali Kota Denpasar (2010-2015) yang dijabat oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra keturunan mantan Gubernur Bali, almarhum Ida Bagus Mantra yang pernah menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan di era Orde Baru. Tokoh-tokoh yang mempunyai garis keturunan dari penguasa atau raja atau mantan gubernur di masa lalu itu, tampaknya masih mendapat apresiasi di hati pendukungnya di era Bali memasuki masa modern.

Terpilihnya tokoh-tokoh ini memang erat kaitannya dengan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung di masyarakat, di mana pemilihannya melalui pemilihan langsung, dan parallel dengan adanya semangat atau konsep

---

<sup>2</sup> Pada saat itu, Kerajaan Mengwi menaklukkan Kerajaan Blambangan, di Jawa Timur. Henk Schulte Nordholt, *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali, 1650-1940*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV Jakarta, 2006.

“putra daerah” yang tidak terlepas dari basis-basis akar-akar sosial budaya atau ikatan primodiarlisme yang ada di masyarakat Bali. Tidak mengherankan juga, bahwa dengan terpilihnya tokoh-tokoh ini, maka dilakukan rangkaian kegiatannya yang ada kaitannya dengan persoalan adat, agama yang dominan di Bali. Ini berarti, bahwa bagaimana persoalan-persoalan asset sosial dan budaya itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ke arah terciptanya komoditas politik sebagaimana sekarang dilakukan oleh *puri-puri* ini. Dari gambaran ini dapat dilihat, di satu pihak memang masyarakat yang tidak mampu merasa dibantu dalam pelaksanaan ritual atau upacara ini, dan di lain pihak tampak bagaimana tradisi lama tampaknya masih berkembang di saat sekarang. Akan tetapi, dalam hal ini perlu dilihat bahwa hubungan-hubungan antara *puri* (yang dahulu merupakan pusat kekuasaan) tampak dikembangkan.<sup>3</sup> Untuk saat ini yang bisa dicatat adalah bagaimana pelaksanaan upacara *memukur massal* secara gratis yaitu upacara yang dilakukan setelah upacara *ngaben* selesai, yang diprakarsai oleh pimpinan-pimpinan ini dalam upaya melestarikan ikatan-ikatan tradisi itu.

Tidak hanya persoalan otonomi daerah yang menjadi pembahasan dewasa ini, tetapi juga fenomena keinginan memiliki otonomi khusus juga terjadi di Bali, sebagaimana yang berkembang di daerah lainnya. Misalnya, Aceh yang sudah memiliki konsep otonomi khusus yang jelas, juga sebagaimana yang terjadi di Papua. Persoalan-persoalan otonomi khusus ini menyangkut bagaimana kue pembangunan bisa dinikmati secara adil dan sejahtera di masyarakat.

<sup>3</sup> I Ketut Ardhana, *Balinese Puri in Historical Perspective: the Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes, in Badung, South Bali*. Unpublished Master Thesis. Canberra: Faculty of Asian Studies-the Australian National University, 1993.



Perkembangan pariwisata telah membuat pembangunan fasilitas akomodasi di tepi Pantai Kuta mengikis ruang hijau yang rimbun.

### **Pariwisata dan Keamanan Manusia**

Bila fenomena di atas tetap berkembang maka masyarakat Bali sebenarnya menghadapi berbagai persoalan yang tidak hanya menyangkut keamanan kelompok, tetapi juga menyangkut keamanan individu. Terlebih-lebih pariwisata adalah andalan utama masyarakat dimana sebagian besar masyarakatnya berkecimpung di sektor ini, Bali menjadi barometer tidak hanya di tingkat Bali, tetapi juga bagi barometer keamanan di Indonesia. Lihat saja misalnya bagaimana dampak peristiwa bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 (Gaborieau 2005). Seketika mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, di mana pemulihan (*economic recovery*) secara lambat laun bisa dilakukan, meskipun tidak secara cepat seperti di Asia Tenggara misalnya yang dilakukan oleh Thailand yang mampu menangani konflik, bencana karena adanya manajemen konflik dan bencana yang baik (Chongkittavorn 2003; Azra 2003).

Pada masa lalu wisatawan mencari keamanan di Bali, demikian juga masyarakatnya merasa aman, sehingga tidak

mengherankan pulau yang kecil ini disebut sebagai “Pulau Surga” (Vickers 1989). Namun, sekarang keamanan dalam konteks keamanan manusia menjadi mahal harganya. Rasa aman tidak hanya bertitik tolak pada kelompok tertentu, rasa aman mestinya ada pada setiap insan individu. Kalau rasa aman individu bisa tercipta, maka berpengaruh pada rasa aman tingkat kelompok bahkan dalam skala yang lebih besar di tingkat bangsa. Rasa tidak aman mulai terlihat misalnya lihat saja di mana-mana setiap ada kegiatan upacara atau ritual untuk menjaga ketertiban maka ditugaskanlah para *pecalang* atau polisi tradisional Bali (Suyadnya 2011), demikian juga pada bangunan hotel bahkan di beberapa rumah pribadi mulai memasang kamera CCTV. Ini menunjukkan bagaimana Bali menjadi tidak aman. Apabila rasa tidak aman muncul maka berpengaruh pula tingkat kunjungan wisatawan dalam kaitannya dengan peningkatan pemerolehan devisa Negara.

### **Tata Ruang dan Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan**

Perkembangan industri pariwisata seperti yang terjadi dewasa ini telah berdampak multidemensi dalam aspek sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik masyarakat. Meskipun demikian di Bali sebenarnya sudah ada nilai-nilai lokal yang mengatur hubungan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan dan hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan *Tri Hita Karana*.

Intensitas pengaruh pariwisata yang terjadi di Bali secara cepat mengusik nilai-nilai keseimbangan yang terjadi di masyarakat, meskipun tingkatan pengaruhnya memang berbeda-beda. Ada daerah-daerah yang begitu cepat mengalami perubahan akibat perkembangan pariwisata seperti di kawasan pantai dan ada juga daerah yang lamban

dalam mengakomodasikan kepentingan dunia pariwisata ini seperti wilayah yang berlokasi di pegunungan. Sebut saja misalnya di daerah Tenganan yang termasuk Bali Aga atau yang dikenal dengan Bali Mula atau Bali Asli tampak cukup lamban dalam mengalami perubahan-perubahan masyarakatnya, akan tetapi sangat tergantung dengan perkembangan sektor pariwisata (Geriya 2003:189). Masyarakat di sini secara ketat menjaga lahan yang dimilikinya dan tidak diperbolehkan menjual tanah, karena tanah-tanah di sini merupakan tanah yang dimiliki secara kolektif atau tanah desa.

Masyarakatnya pun di bawah naungan prebikel dan bendesa adat mengawal berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di desa. Misalnya saja, bagaimana misalnya semua rumah yang ada di baris paling depan setiap warga harus mempertahankan atap dari daun kelapa atau ijuk sebagai upaya mempertahankan tradisi atau rumah adat yang sudah diwarisinya secara turun temurun. Begitu pula dalam hal sanitasi misalnya yang sudah terpelihara dengan baik dan adanya semangat gotong royong yang masih dijalankan secara berkelanjutan. Namun demikian, perlu dicatat, bahwa rumah-rumah di desa ini dipertahankan bentuknya dan jarang yang direnovasi tembok yang terbuat dari tanah, sehingga desa ini termasuk desa tertinggal di Bali. Meskipun demikian desa ini bersyukur sebagai desa tertinggal, karena bantuan pemerintah terhadap desa yang tergolong tertinggal ini berjalan terus. Oleh karena itu, meskipun tergolong desa tertinggal, sebenarnya penduduknya tidak kekurangan dalam arti tidaklah miskin. Inilah gambaran desa yang mempertahankan tradisi budayanya di Bali ini menjadi salah satu aset promosi pariwisata dimana produk-produk kerajinan yang dipromosikan dan dijual di sini tidak hanya dari Desa Tenganan saja seperti kain Pegringsingan, tetapi

juga produk-produk kerajinan yang berasal dari luar Bali seperti dari Dayak, Papua, Timor dan daerah-daerah lainnya di Indonesia (Ardhana 2011a).

Sementara itu bagi daerah-daerah kawasan pantai seperti di Kabupaten Badung yaitu Kuta, Jimbaran, Legian, Sanur dan Nusa Dua, di Kabupaten Tabanan seperti Tanah Lot, di Kabupaten Klungkung seperti Goa Lawah, di Kabupaten Karangasem yaitu Candi Dasa, dan di Kabupaten Buleleng yaitu Pantai Lovina telah mengalami perubahan-perubahan terhadap tata lingkungan dan pola kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Badung, seperti Jimbaran meskipun telah ada yang disebut Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat kabupaten (*landscape regulation*), namun tetap saja tanah-tanah di kawasan itu semakin lama semakin habis terjual kepada investor untuk kepentingan infrastruktur pariwisata. Keluhan akan tidak jelasnya masalah tata ruang Bali di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten seperti adanya perdebatan yang tanpa akhir mengenai konsep tinggi bangunan menunjukkan akan adanya kepentingan yang lebih besar terhadap perubahan tata ruang di Bali. Dahulu misalnya memang tidak diizinkan membuat tinggi bangunan tingkat baik hotel atau rumah di Bali yang melebihi 10 meter atau melebihi tinggi pohon kelapa. Kecuali bangunan Grand Bali Beach yang sudah terlanjur dibangun di kawasan Pantai Sanur pada tahun 1966.

Sekarang konsep tentang ketinggian bangunan mulai dipertanyakan, karena dengan tidak adanya konsep bangunan tingkat itu, maka pembangunan dilakukan tidak secara vertikal tetapi secara horizontal dan akibatnya adalah luas lahan yang dijamah semakin banyak diantaranya lahan sawah yang subur termasuk adanya subak yang dikenal sebagai organisasi pengairan yang sangat handal di Bali dalam kaitannya dengan pengaturan atau pembagian air bagi lahan-lahan sawah. Beberapa lahan pertanian sudah

tidak berfungsi lagi dan bahkan, subak-subak yang ada di dalamnya semakin lenyap ditelan masa perubahan akibat berdirinya bangunan-bangunan beton. Sangat jarang ditemukan sekarang adanya lumbung-lumbung penyimpan padi di rumah-rumah penduduk di Bali. Para petani yang masih menekuni profesi petaninya itu, kalah bersaing dengan profesi lainnya seperti PNS, pengusaha hotel, restaurant, café, pedagang, dan pengrajin.

Di Kabupaten Gianyar misalnya bagaimana menjamurnya usaha-usaha kerajinan telur hias yang dihiasi yang terdapat di pinggir-pinggir jalan dari Denpasar ke Gianyar. Mereka membuka usaha-usaha itu, akan tetapi karena mereka kurang memiliki keterampilan mereka pun kalah bersaing (*competitiveness*) dengan usaha-usaha yang lebih besar. Padahal profesi sebagai petani sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Apresiasi terhadap profesi sebagai petani pun menjadi tidak diminati oleh generasi muda Bali, inilah menjadi salah satu sebab mengapa penjualan lahan-lahan gencar terjadi.

Ada akibat krusial yang terjadi terhadap penjualan lahan-lahan ini. Apabila lahan-lahan dijual maka subak pun akan hilang, ini berpengaruh terhadap eksistensi lembaga-lembaga adat yang ada di pedesaan, yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, maka lama kelamaan identitas mereka pun sebagai orang Bali akan hilang (cf. Ramstedt 2003; Berger 2000). Perlu dikaji secara mendalam bagaimana misalnya sebuah identitas menghilang yang di dalamnya tentu persoalan-persoalan karakter ini semakin dipertanyakan. Inilah ancaman terberat yang terjadi di Bali, karena persoalan pariwisata adalah persoalan yang dilematis. Di satu pihak, sangat dibutuhkan karena menjadi sektor andalan terbesar masyarakat Bali, namun di pihak lainnya apabila tidak diatur berdasarkan aturan-aturan yang jelas dan payung hukum serta implementasi yang jelas, maka pemaksaan-

pemaksaan terhadap apa yang sudah ada sejak dahulu sebagai warisan nenek moyang bangsa akan mengalami pengikisan-pengikisan budaya secara terus-menerus. Bagaimana pun juga perlu dicatat bahwa citra pariwisata Bali yang dikembangkan selama ini menitikberatkan pariwisata budaya (*cultural tourism*) yang bertitik tolak dari konsep adat dan agama ini. Hal ini bisa dimengerti karena kedua konsep ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.

### **Simpulan**

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat Bali sebagai akibat perkembangan global atau globalisme yang terjadi, dan masyarakat Bali memberikan respons dalam kaitannya dengan pemahaman mereka di tingkat lokal atau multi-versalisme.

Perkembangan globalisasi ini di satu pihak, berdampak positif dalam arti semakin adanya diversifikasi lapangan pekerjaan terutama di sektor pariwisata. Akan tetapi, akibat globalisasi ini ternyata tidak hanya menyentuh kehidupan masyarakat kota, tetapi juga kehidupan masyarakat pedesaan yang sebagian besar tergantung di sektor pertanian (Ardhana 2004). Perkembangan industri pariwisata yang cepat membutuhkan akses dan infrastruktur yang cepat yang pada gilirannya tanpa diperkirakan sebelumnya telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang berakibat tersingkirnya tanah-tanah pertanian yang subur yang dijadikan usaha di sektor pariwisata. Tidak hanya tanah yang tergusur, tetapi juga organisasi pertanian seperti subak mulai kehilangan maknanya.

Apabila hal ini dibiarkan terus berlangsung, maka ditengarai akan merusak lingkungan, tatanan sosial budaya yang sudah terbentuk sejak lama dan menjadi akar kebudayaan masyarakat Bali. Inilah sebabnya mengapa



perdebatan dan pembahasan terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mendapat perhatian di berbagai kalangan dalam upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dianggap mampu menghadapi berbagai ancaman terhadap masyarakat Bali. Perubahan-perubahan krusial yang terjadi terutama dalam kaitannya dengan fenomena yang mengarah pada terjadinya alih fungsi lahan termasuk lembaga-lembaga adat dan agama yang ada di dalamnya yang tampaknya mulai tersingkir. Karena fenomena ini menyangkut inti karakter sebagai orang Bali terutama dalam kaitannya dengan persoalan identitas sebagai manusia Bali, maka persoalan-persoalan ini pun menjadi semakin krusial yang dibahas dalam berbagai pertemuan adat, agama, akademik dalam berbagai kesempatan. Karena semua prasarat sebagai manusia Bali sebenarnya berlandaskan pada prinsip adat dan budaya itu yang saling berkaitan. Untuk itu, respons pun muncul di kalangan masyarakat Bali yang berusaha mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam kaitannya dengan nilai-nilai multi-versalisme yang ada di masyarakat. Hal ini dianggap signifikan untuk diangkat dalam upaya mempertahankan nilai-nilai karakter manusia Bali yang berakar pada nilai-nilai tradisi budaya masyarakat dalam memasuki era Bali modern dewasa ini.

## Daftar Pustaka

- Ardhana, I Ketut. 2011a. "Review of *the Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: In cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation*" in the *Journal of Indonesia*, Vol. 91, Cornell, the United States.
- Ardhana, I Ketut (et al.). 2011b. *Masyarakat Multikultural Bali: Tinjauan Sejarah, Migrasi dan Integrasi*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ardhana, I Ketut dan Yekti Maunati. 2010. *Indonesian Experiences: Research Policies and the Internationalization of*

- the Social Sciences”, dalam Michael Kuhn dan Doris Weidemann (eds.). *Internationalization of the Social Sciences: Asia, Latin America-Middle East-Africa-Eurasia*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- Ardhana, I Ketut. 2009. “Harapan Kita, Sebuah Renungan”, dalam Kasijanto Sastrodinomo (ed). *Pancasila: Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita*, Buku Kenangan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2009. Jakarta: Panitia Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Ardhana, I Ketut. 2007. “The Question of Nationalism and Local Identity: Decentralization in Bali”, dalam *Questions of Nationalism and Cultural Identities in the Present Day Asia*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences (PSDR-LIPI) and the Japan Foundation.
- Ardhana, I Ketut. 2004. “Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi”, dalam I Wayan Ardika dan I Nyoman Dharma Putra. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.
- Ardhana, I Ketut. 1993. *Balinese Puri in Historical Perspective: the Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes, in Badung, South Bali*. Unpublished Master Thesis. Canberra: Faculty of Asian Studies-the Australian National University.
- Azra, Azyumardi. 2003, “Bali and Southeast Asian Islam: Debating the Myths”, dalam Kumar Ramakhrisna and See Seng Tan. *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, Institute of Defence and Strategic Studies and Nan Yang Technological University, Singapore.
- Berger, Arthur Asa. 2000. *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogya: Tiara Wacana.
- Chongkittavorn, Kavi. 2003. “Evaluating Western Media Perceptions of Thailand: After the Bali Bombing” dalam Kumar Ramakhrisna and See Seng Tan. *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, Institute of Defence and Strategic Studies and Nan Yang Technological University, Singapore.
- Elson, R.F. 2008. *The Idea of Indonesia*, University Press, Cambridge.
- Gaborieau, Marc. 2005. “Konflik Hindu-Muslim di India dalam Perspektif Sejarah” dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith and Roger Tol (ed.), *Konflik Kekerasan*

*Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Yayasan Obor, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV, Jakarta.

- Geriya, I Wayan. 2003. "Pola Partisipasi dan Strategi Perjuangan Hak-hak Komuniti Lokal dalam Pembangunan Pariwisata di Era Multikultural (Perspektif Pariwisata Budaya Bali)", dalam I Gde Semadi Astra (ed.). *Guratan Budaya dalam Perspektif Multikultural (Katurang ri Kalaning Purnabakti)*. Denpasar: Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana.
- Hisyam, Muhamad (ed.), (Kata Pengantar Taufik Abdullah). 2005. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Obor.
- Klinken, Gerry van. 2005, "Pelaku Baru, Identitas Baru: Kekerasan Antar Suku Pada Masa Pasca Soeharto di Indonesia", dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith and Roger Tol (ed.), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Yayasan Obor, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Penguasaan Tanah Adat: Dokumen Teknis Pedoman Pengakuan Hak Penguasaan Bersama Atas Tanah Adat*. Jakarta: PT BILPAS Asri Kersana.
- Ramstedt, Martin. 2004, "Introduction: Negotiating Identities-Indonesia Hindus' between Local, National and Global Interest", dalam Martin Ramstedt (ed.), *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National and Global Interests*. Routledge Curzon, Oxford.
- R, Thomas. 2011. "Understanding Fortress Bali: The Impact of Democratization and Religious Revival in Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 1, No. 1. April.
- Schulte Nordholt, Henk. 2006. *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali, 1650-1940*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV.
- Suyadnya, I Wayan. 2011, "Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali", in *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 1, No. 1. April.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2005. "Kegagalan Indonesia Melaksanakan Proyek Pembangunan Bangsa", dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith and Roger Tol (ed.), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Yayasan Obor, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV, Jakarta.
- Vickers, Adrian. 1989. *Bali: A Paradise Created*. Singapore: Periplus Editions.